

CONSULTATIVE FUNCTION MONITORING AGENCY VILLAGE (BPD) PNPM Mandiri THE IMPLEMENTATION OF RURAL VILLAGE IN THE DISTRICT MANDOLANG KALASEY DISTRICT MINAHASA

Natalia Gledis Takasily
Alden Laloma
Joorie M. Ruru

ABSTRACT : Village Consultative Body (BPD) is one of the perpetrators of PNPM Rural in the village which serves as the agency that oversees the process of each stage desa. Tujuan PNPM Rural in this study to determine how the function of BPD supervision of the implementation of PNPM Rural Village Kalasey One Subdistrict Mandolang Minahasa.

The method used is descriptive qualitative method. The focus of research is supervision of BPD at the planning and implementation stages of PNPM Mandiri in the village. Informants were taken from perpetrators PNPM Rural Village Kalasey One, entirely as many as 10 people. Data collection techniques used were interviews. Data analysis technique used is descriptive-qualitative analysis interactive model of Miles and Huberman.

Based on research results ditariki conclusions: (1). BPD supervisory functions in the planning activities of PNPM Rural done fairly well, namely through the activity of BPD in every stage of the planning of activities ranging from the preparation and dissemination of early, stage of planning at the village and district. (2) The oversight function of BPD at the stage of implementation of PNPM Mandiri in the village is quite well done is through the activity of BPD in each stage of the start of the preparatory meetings implementation in the village, distribution and use of funds, procurement of labor, materials and tools, monitoring and evaluate progress on implementation of activities in the field, and village meetings for accountability by the implementation team.

Based on the results of this penellian then it can be recommended some suggestion that: although PNPM Mandiri is no longer there, but the results achieved must be maintained and preserved to support the efforts penanggulangan poverty. For that BPD oversight function to be needed in the maintenance and preservation of the results of PNPM Mandiri.

Keywords: Monitoring, BPD, PNPM Mandiri.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan structural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus menggunakan pendekatan multi-disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan pasca krisis ekonomi pada tahun 1998 antara lain adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1998 sampai tahun 2006. Kemudian mulai tahun 2007 pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Pendekatan PNPM Mandiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil terutama dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

Pendekatan yang digunakan dalam program tersebut lebih menekankan pada pentingnya pemberdayaan.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Visi program ini adalah terciptanya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Tujuan umum program ini ialah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khusus program ini adalah : (1) meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pembangunan; (2) melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal; (3) mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif; (4) mengembangkan prasarana/sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; (5) melembagakan pengelolaan dana bergulir; dan (6) mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen

Hampir semua literatur atau buku teks manajemen menulis bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu fungsi manajemen yang fundamental atau fungsi organik manajemen. Terry (1990) menyebutkan fungsi manajemen terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakkan), dan *controlling* (pengawasan atau pengendalian). Stoner & Wankel (2000) menyatakan ada empat fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*. Kinard Jerry (dalam Manullang, 2014) menulis ada lima fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading*, dan

controlling. Pendapat para ahli manajemen tersebut jenis menunjukkan bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi yang harus ada dalam proses manajemen, ia merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen (Hasibuan, 2000).

Richard Daft dan Norman Macintosh (Stoner dan Wankel, 2000) mendefinisikan pengawasan (*controlling*) adalah proses melalui mana pimpinan dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Lanjut dikatakan, proses pengawasan mengukur kemajuan pencapaian tujuan yang direncanakan, dan memungkinkan pemimpin mendeteksi dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan. Wiliam Chucs (Manullang, 2014) mendefinisikan *controlling* adalah proses pengaturan sebagaimana standar yang akan dicapai dengan membandingkan aktual dengan standar yang dimaksud dan kalau perlu mengambil langkah-langkah korektif mengembalikan kinerja sesuai standar yang telah ditentukan sebelumnya. Earl Strong (Hasibuan, 2000) mendefinisikan pengawasan/pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, Siagian (2000) berkesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran pelaksanaan suatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Heinz dan Koontz (Manullang, 2014) mengatakan bahwa *controlling* adalah fungsi manajemen untuk mengukur dan mengoreksi kinerja melihat apakah manajemen telah mencapai sasaran yang direncanakan untuk dicapai. Pendapat yang hamper sama dikemukakan oleh Terry (terjemahan, 1990) bahwa pengawasan adalah suatu usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi/hasil kerja dan

apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai dengan rencana.

Apapun jenis pengawasan yang dilakukan itu, sasaran utama pengawasan adalah (Siagian, 2000) :

- 1) Pengawasan yang ditujukan kepada kegiatan yang sifatnya fisik;
- 2) Pengawasan mengenai penggunaan anggaran pembangunan telah telah dialokasikan untuk membiayai proyek/program tertentu.
- 3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pengawasan terhadap bidang kepegawaian dengan segala seginya;
- 5) Pengawasan terhadap penggunaan logistik yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional.
- 6) Pengawasan terhadap prosedur kerja yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional.

William Newman (dalam Stoner dan Wakel, 2000) membagi metode pengawasan/pengendalian atas empat jenis pokok, yaitu :

- a. Pengawasan/pengendalian pra-tindakan (*pre-ction control*); adalah metode pengawasan untuk memastikan bahwa sebelum suatu tindakan dilakukan maka sumberdaya manusia, bahan, dan keuangan yang diperlukan telah dianggarkan. Bila tiba saatnya diambil tindakan, maka anggaran memastikan sumberdaya yang diperlukan itu akan tersedia dalam jenis, mutu, jumlah, dan tempat sesuai kebutuhan.
- b. Pengawasan/pengendalian kemudi (*steering control*) atau pengawasan/pengendalian umpan-ke-depan (*feedforward ncontrol*); adalah metode pengawasan yang dirancang untuk mendeteksi penyimpangan-

penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tindakan tertentu dirampungkan.

- c. Pengawasan/pengendalian penyaringan; merupakan suatu proses penyaringan dimana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan.
- d. Pengawasan/pengendalian purna-tindakan (*post-action control*); adalah mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan.

Menurut Hasibuan (2000), bahwa pada dasarnya ada dua jenis metode pengawasan/pengendalian, yaitu :

- a. Pengawasan/pengendalian preventif (*preventive control*); adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau kegiatan dilakukan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan preventif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti : membuat peraturan yang berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan; membuat pedoman-pedoman kerja; menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran, mengkoordinasikan segala macam kegiatan; dan menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
- b. Pengawasan/pengendalian represif (*repressive control*); adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan atau setelah terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud tidak terjadi pengulangan kesalahan. Pengawasan represif ini dapat dilakukan dengan cara seperti : membandingkan antara hasil-hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan; mencari penyebab terjadinya

kesalahan/penyimpangan; memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan; melaksanakan sanksi-sanksi yang telah ditentukan terhadap penyimpangan/kesalahan; menilai kembali prosedur-prosedur yang telah ditentukan; dan mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut Siagian (2000) :

- a. Pengawasan langsung (*direct control*); ialah pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan organisasi terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : inpeksi langsung, *on-the-spot observation*, dan *on-the-spot report*.
- b. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*); ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Pengawasan di bidang pemerintahan dan pembangunan dapat dibedakan berdasarkan beberapa faktor tertentu (LAN, dalam Nawawi, 1996), yaitu :

- a. Berdasarkan subyek yang melakukan pengawasan, terdiri atas :
 - 1) Pengawasan fungsional, ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, seperti inspektur jenderal (Itjen), inspektorat propinsi/kabupaten/kota, BPKP, BPK.
 - 2) Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinya.
 - 3) Pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh

lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD).

- 4) Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa tergolong pada pengawasan masyarakat.
- b. Dilihat dari jenis pengawasannya, terdiri atas :
 - 1) Pengawasan intern (pengawasan melekat dan pengawasan fungsional). Pengawasan fungsional terdiri dari pengawasan fungsional intern instansi (seperti Itjen, Inspektorat propinsi/kabupaten/kota) dan pengawasan intern pemerintah seperti BPKP dan Irjenbang.
 - 2) Pengawasan ektern, yaitu pengawasan ektern instansi dan pengawasan ektern pemerintah.
- c. Dilihat dari cara pengawasannya, terdiri atas :
 - 1) Pengawasan langsung, ialah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan berlangsung (inpeksi atau pemeriksaan).
 - 2) Pengawasan tidak langsung, ialah pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan.
- d. Dilihat dari waktu pelaksanaan pengawasan, terdiri atas :
 - 1) Sebelum kegiatan, ialah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai (misalnya mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja, penetapan petunjuk operasional). Jenis pengawasan ini disebut juga pengawasan preventif.
 - 2) Selama kegiatan, ialah pengawasan dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Jenis pengawasan ini disebut juga pengawasan represif.

- 3) Sesudah kegiatan, ialah pengawasan yang dilakukan sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan memperbandingkan antara rencana dan hasil.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian pada bagian pendahuluan di atas bahwa pengaturan mengenai kedudukan, fungsi dan wewenang BPD ditetapkan di dalam UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 209 dan pasal 210), pada PP.72 Tahun 2005 tentang Desa (pasal 29 s/d pasal 42), dan terakhir dipertegas dalam UU. No.6 Tahun 2014 tentang Desa (pasal 55 s/d pasal 65), dan dalam PP.No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014 (pasal 72 s/d pasal 79).

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan tersebut bahwa BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedudukan dan fungsi BPD dipertegas kembali dalam UU. No.6 Tahun 2014,

C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

- (1) Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin, pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Berdasarkan Keputusan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) adalah

program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan aktual pelaksanaan *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Dalam pelaksanaan program ini untuk penanggulangan kemiskinan adalah berbasis pemberdayaan.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Williams (Moleong, 2006) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Menurut Moleong (2006) bahwa penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Bungin (2009)

B. Definisi Konsepsional Fokus Penelitian

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Fokus penelitian tersebut secara konseptual didefinisikan sebagai aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh BPD selaku badan pengawasan terhadap proses tahapan PNPM Mandiri di desa (tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan) guna memastikan bahwa PNPM Mandiri berjalan tertib dan lancar serta mencapai tujuan yang diharapkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.

C. Jenis Data dan Sumber Data (Informan)

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data yang bersumber langsung dari informan. Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen dan berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Salah satu sifat penelitian kualitatif ialah tidak mementingkan jumlah sumber data/informan, tetapi yang lebih dipentingkan ialah *content*, relevansi, dan sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Karena itu teknik pengambilan atau penentuan informan/sumber data yang tepat adalah teknik *purposive* yaitu pengambilan informan secara sengaja atau dengan tujuan tertentu (Sugiono, 2006).

Sumber data atau informan pada penelitian ini diambil dari semua unsur pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Desa Kalasey I Kecamatan Mandolang dan ditambah dengan unsur tokoh masyarakat/agama dan warga desa. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 10 orang.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2006) bahwa salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan instrumen

kunci/utama (*key instrumen*). Lanjut menurut Moleong (2006) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama pengumpulan data yaitu peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dilengkapi dengan teknik observasi dan dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Dataprimer yang terkumpul melalui wawancara diolah dan dianalisis dengan metode/teknik analisis kualitatif. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah analisis model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1992). Menurut Miles dan Huberman, analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi. Langkah-langkah proses analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PNPM Mandiri Perdesaan adalah merupakan program nasional untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak Tahun 2007 sebagai kelanjutan atau pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak Tahun 2003. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk mobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, serta

mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi pengawasan BPD pada perencanaan kegiatan dan pada pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di desa. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan BPD pada perencanaan kegiatan PNPM Mandiri di Desa Kalasay Satu dilakukan dengan cukup baik yaitu melalui keaktifan BPD dalam setiap tahap perencanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan dan sosialisasi awal, tahap perencanaan di desa dan di kecamatan. Pengawasan BPD pada tahap perencanaan di desa diwujudkan dengan keaktifan BPD di dalam setiap pertemuan yang berkenaan dengan perencanaan kegiatan PNPM Mandiri mulai dari musyawarah penggalan gagasan sampai musyawarah desa (mudes) perencanaan di kecamatan diwujudkan dengan keaktifan BPD dalam musyawarah perencanaan di tingkat kecamatan yaitu Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan dan Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan kegiatan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Fungsi pengawasan BPD pada tahap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di desa dilakukan dengan cukup baik di Desa Kalasey yaitu melalui keaktifan BPD dalam setiap tahap pelaksanaan mulai dari rapat persiapan pelaksanaan di desa, penyaluran dan penggunaan dana, pengadaan tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan musyawarah desa pertanggung jawaban oleh tim pelaksana kegiatan.

B. Saran

Bertolak dari hasil penellian ini maka dapatlah direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meskipun PNPM Mandiri Perdesaan sudah tidak ada lagi, namun hasil-hasil yang dicapai harus terus dipelihara dan dilestarikan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu fungsi pengawasan BPD tetap diperlukan dalam pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Untuk efektifnya fungsi pengawasan BPD dalam pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil PNPM Mandiri Perdesaan, maka diperlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait yang ada di desa terutama kepala desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin,B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*,PT.Kencana, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1992, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Hasibuan,M. 2000, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Manullang, Laurence A., 2014, *Teori dan Aplikasi Manajemen : Komprehensif dan Integralistik*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nawawi,H. 1996, *Pengawasan Melekat*, Jakarta : Erlangga.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Siagian, S.P., 2000, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.

Stoner, L.J. dan C. Wankel, 2000, *Manajemen* (terjemahan), Jakarta, Intermedia.

Sugiono, 2006, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

Terry, G.R., 1990, *Asas-Asas Manajemen* (terjemahan), Bandung, Alumni.

Sumber Lain :

- *Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, Direktorat Jenderal PMD Departemen Dalam Negeri, Tahun 2007.